

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abdul Rasyid Thalib, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Adnan Buyung Nasution dan A. Putra M. Zen, 2006, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Arbi Sanit, 1985, *Perwakilan Politik di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press

Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI.

B. Arief Sidharta, 2008, *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung: P.T. Refika Aditama.

Bintan R. Saragih, 1987, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama.

Harjono, 2008, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa Pemikiran Hukum Dr. Harjono, S.H.,M.C.L Wakil Ketua MK*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Maruarar Siahaan, 2012, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sinar Grafika.

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 2010, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT Sastra Hudaya.

Muhadam Labollo dan Teguh Ilham, 2015, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Putera Astomo, 2018, *Ilmu Perundang-Undangan (Teori dan Praktik di Indonesia)*, Depok: Rajawali Pers.

Ramlan Surbakti, 2008, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Rozali Abdullah, 2009, *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*, Jakarta: Rajawali Pers.

Sabian Ustman, 2014, *Metode Penelitian Hukum Progresif: Pengembangan Permasalahan Penelitian Hukum (Aplikasi Mudah Membuat Proposal Penelitian Hukum)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Saldi Isra, 2017, *Pemilu dan Pemulihan Daulat Rakyat*, Jakarta: ThemisBooks.

Sodikin, 2014, *Hukum Pemilu, Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, Bekasi: Gramata Publishing.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press.

Syahrial Syarbani, A. Rahman, dan Monang Djihado, 2002, *Sosiologi dan Politik*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

## B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention On the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*).

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Convention on the Elimination of All forms of Racial Discrimination* 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Sipil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On the Rights of Person With Dissabiities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention On the Protection of the Rights of All Migrant Workers*

*and Members of Their Families* ( Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003.

PKPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

C. Kamus dan Ensiklopedia

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

D. Jurnal

Aprista Ristyawati, 2019, Penguatan Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia Pasca Putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019, *Jurnal Hukum Administrasi dan Pemerintahan*, 2(2):3(tersedia online pada : <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/download/5083/2697> ).

Bisarayadi, 2017, Hak Pilih sebagai Hak Konstitusional: Hak Konstitusional Turunan ataukah Hak Tersirat?, *Mahkamah Konstitusi Republik*

*Indonesia*, (tersedia online pada :  
<https://bisariyadi.files.wordpress.com/2017/12/bisariyadi-hak-pilih-sebagai-hak-konstitusional.pdf> ).

Janpatar Simamora, 2013, Perlindungan Hak Memilih Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara, *Jurnal Yudisial*, 6(2):138 (tersedia online pada :  
<https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/109> )

Janpatar Simamora, 2013, Analisa Yuridis terhadap Model Kewenangan Judicial Review di Indonesia, *Mimbar Hukum*, 25(3): 389 (tersedia online pada : <https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16079> ).

Mahmuda Pancawisma Febriharini, 2016, Pelaksanaan Program KTP-EL dalam Rangka Tertib Administratif Kependudukan, *Jurnal Hukum Ilmiah UNTAG Semarang*, 5(2):19 (tersedia online pada : [https://www.google.com/search?q=Mahmuda+Pancawisma+Febriharini.2016.Pelaksanaan+Program+KTP-EL+dalam+Rangka+Tertib+Administratif+Kependudukan&rlz=1C1PRFI\\_enID847ID847&oq=Mahmuda+Pancawisma+Febriharini.2016.Pelaksanaan+Program+KTP-EL+dalam+Rangka+Tertib+Administratif+Kependudukan&aqs=chrome..69i57j69i60.623j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#](https://www.google.com/search?q=Mahmuda+Pancawisma+Febriharini.2016.Pelaksanaan+Program+KTP-EL+dalam+Rangka+Tertib+Administratif+Kependudukan&rlz=1C1PRFI_enID847ID847&oq=Mahmuda+Pancawisma+Febriharini.2016.Pelaksanaan+Program+KTP-EL+dalam+Rangka+Tertib+Administratif+Kependudukan&aqs=chrome..69i57j69i60.623j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#)).

Nanang Sri Darmadi, 2011, Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *UNISULLA*, 26(2): 672

(tersedia online pada:

<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/view/215>).

Nurul Qamar, 2012, Kewenangan Judivcial Review Mahkamah Konstitusi,

*Jurnal Konstitusi*, 1(1): 3 (tersedia online pada:

<https://jk.ejournal.unri.ac.id/index.php/JK/article/view/2081>).

#### E. Internet

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/2941-hak-politik-warga-negara-sebuah-perbandingan-konstitusi.html>.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Hak\\_suara](https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_suara).

<http://eprints.uny.ac.id/23563/4/4.%20BAB%20II.pdf>.

<http://indonews.id/mobile/artikel/20473/Putusan-MK-Soal-Penambahan-Waktu-Pendaftaran-DPTb-Buka-Peluang-Mobile-Voters/>.

<https://amp.kompas.com/nasional/read/2019/03/28/19192151/ini-tanggapan-bawaslu-pasca-putusan-mk-soal-uji-materi-uu-pemilu>.

<https://nasional.kompas.com/read/2019/04/08/16372661/dampak-putusan-mk-kpu-akan-tambah-tps>.

